

Pengaruh Transparansi Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

Alisyah Rahman^{1*}, Harun Blongkod²

¹ Akuntansi; Universitas Negeri Gorontalo; Jl. Jendral Sudirman No 6, Wumialo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo; e-mail: lisamayang17@gmail.com

² Akuntansi; Universitas Negeri Gorontalo; Jl. Jendral Sudirman No 6, Wumialo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo; e-mail: blongkod@ung.ac.id

* Korespondensi: e-mail: lisamayang17@gmail.com

Diterima: 11 Juni 2026 ; Review: 19 Juni 2026; Disetujui: 25 Juni 2025

Cara sitasi: Rahman A, Blongkod H. 2026. Pengaruh Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Online Insan Akuntan*. 11 (1): Halaman 16-33.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dampak transparansi dan pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo. Transparansi dan pengelolaan keuangan merupakan unsur fundamental dalam tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, yang diharapkan dapat menjamin akuntabilitas keuangan. Studi kuantitatif ini melibatkan pengumpulan data melalui kuesioner yang didistribusikan kepada 113 responden, meliputi aparatur pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan dukungan perangkat lunak AMOS 24 dan SPSS 16. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa transparansi dan pengelolaan keuangan tidak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo. Temuan ini menarik, mengingat secara konseptual kedua variabel diasumsikan memiliki hubungan yang erat dan positif.

Kata kunci: Transparansi, Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Abstract: This study examines the impact of transparency and financial management on the financial accountability of local governments in Gorontalo Province. Transparency and financial management are fundamental elements in effective local governance, which are expected to ensure financial accountability. This quantitative study involved data collection through questionnaires distributed to 113 respondents, including local government officials, relevant stakeholders, and the community in Gorontalo Province. The collected data were then analyzed using the *Structural Equation Modeling* (SEM) method with the support of AMOS 24 and SPSS 16 software. The results indicate that transparency and financial management do not have a positive and significant influence on the financial accountability of local governments in Gorontalo Province. This finding is interesting, considering that conceptually the two variables are assumed to have a close and positive relationship.

Keywords: Transparency, Financial Management, Financial Accountability of Regional Government.

1. Pendahuluan

Akuntabilitas keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan publik.

Proses ini mewujudkan transparansi, kejelasan, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku, dengan tujuan utama memastikan alokasi anggaran yang efektif, efisien, serta bebas dari praktik penyimpangan. Tujuan mendasar dari akuntabilitas ini adalah untuk menciptakan keadilan diantara para pemangku kepentingan yang terlibat (Rahimallah & Ricky, 2022). Konsep ini erat kaitannya dengan dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, yang mewajibkan pemerintah untuk mengelola keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara aktif menghindari segala bentuk keadaan atau penyimpangan. Lebih lanjut, akuntabilitas keuangan juga menekan kapabilitas pemerintah dalam menyiapkan laporan finansial yang tepat, terpercaya, serta kredibel sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

Transparansi adalah keterbukaan dalam menyampaikan informasi secara jujur dan jelas kepada pihak yang berkepentingan, sehingga informasi dapat diakses, dipahami, dan diawasi oleh publik. Transparansi juga merupakan konsep yang memberikan kesempatan bagi pihak internal maupun eksternal untuk mengakses informasi yang tepat mengenai aktivitas suatu organisasi, tidak hanya terbatas pada pengungkapan data tetapi juga mencakup keterbukaan dalam operasional dan distribusi informasi secara aktif (Ning et al., 2025). Kebebasan masyarakat dalam menjangkau beragam data publik menjadi landasan utama bagi terciptanya transparansi serta keterbukaan informasi (Ahmad et al., 2022)

Pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai upaya terstruktur untuk merencanakan, memanfaatkan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan sumber daya finansial guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Aspek penting dalam manajemen birokrasi adalah manajemen finansial regional yang menitikberatkan pada mekanisme pemanfaatan anggaran secara transparan, efektif, serta akuntabel. Hal ini tercermin dari pentingnya sistem pelaporan, pencatatan, serta pertanggungjawaban keuangan yang baik guna meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi belanja daerah, serta perlunya sistem informasi keuangan yang terintegrasi agar data keuangan konsisten dan akurat (Faisal, 2025). Dalam konteks tersebut, perencanaan keuangan merupakan tahap awal untuk menentukan arah pengelolaan anggaran secara sistematis agar tujuan tercapai secara efektif. Sementara itu, pertanggungjawaban dan pengawasan memastikan penggunaan anggaran sesuai rencana, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga menciptakan akuntabilitas.

Tinjauan Pustaka

Transparansi

Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintahan daerah, transparansi didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menyediakan dan menyampaikan informasi kepada publik secara jujur, relevan dan mudah diakses. Transparansi tidak hanya mencakup penyediaan informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dapat dipahami dan serta digunakan oleh masyarakat sebagai alat pengawasan terhadap kinerja pemerintah (Auditya et al., 2021) Selain itu, transparansi dianggap sebagai pilar fundamental guna mengimplementasikan good governance, karena masyarakat dapat mengetahui proses pengambilan keputusan serta penggunaan anggaran publik secara lebih terbuka (Anggraini & Afiqoh, 2024).

Transparansi dalam penelitian ini diukur melalui enam indikator, yaitu sarana dan prasarana informasi, kualitas informasi, jenis informasi, kemudahan akses, teknis dan infrastruktur, serta efisiensi dan biaya. Sarana dan prasarana informasi merujuk pada ketersediaan media yang digunakan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, seperti website resmi, media sosial, dan media informasi lainnya. Keberadaan media tersebut berperan penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi keuangan daerah (Nuryani & Firmansyah, 2020). Kualitas informasi mencerminkan sejauh mana informasi yang disampaikan bersifat akurat, jelas, relevan, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sedangkan jenis informasi berkaitan dengan kelengkapan informasi yang dipublikasikan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, realisasi anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (Adi Yuniarta & Gusti Ayu Purnamawati, 2020; Rafael et al., 2024).

Selain itu, transparansi juga ditunjukkan melalui kemudahan akses, teknis dan infrastruktur, serta efisiensi dan biaya. Kemudahan akses menggambarkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh informasi keuangan tanpa hambatan prosedural yang rumit, sedangkan teknis dan infrastruktur berkaitan dengan dukungan sistem dan teknologi informasi yang memungkinkan penyampaian informasi secara cepat, stabil, dan berkelanjutan (Rafael et al., 2024; Octavio & Urumsah, 2024). Adapun efisiensi dan biaya menunjukkan bahwa informasi keuangan daerah dapat diakses dengan mudah, cepat, serta tidak memerlukan biaya tambahan yang memberatkan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dapat meningkatkan efisiensi penyebaran informasi sekaligus memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Octavio & Urumsah, 2024).

Pengukuran variabel transparansi dalam penelitian ini menggunakan enam indikator yang dipilih karena mampu merepresentasikan aspek keterbukaan informasi publik, aksesibilitas informasi, kualitas informasi, serta dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keenam indikator tersebut dinilai sesuai untuk mengukur transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif.

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup pengelolaan sumber daya keuangan, meliputi proses penyusunan rencana, realisasi anggaran, sehingga pelaporan tanggung jawab secara teratur dan senantiasa berpedoman pada regulasi yang sah. Dalam implementasinya, pengelolaan keuangan daerah lebih dari sekedar penggunaan anggaran, serta menekankan asas efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara optimal (Astuti & Madjid, 2024)

Dalam penelitian ini, pengelolaan keuangan diukur melalui enam indikator, yaitu penyusunan anggaran, manajemen arus kas, dana cadangan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja, waktu dan efektivitas pengawasan, serta tindak lanjut hasil pengawasan. Penyusunan anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya keuangan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah (Kadjintuni et al., 2023). Manajemen arus kas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kas agar likuiditas tetap terjaga, sedangkan dana cadangan daerah menggambarkan kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber pendanaan untuk mendukung keberlanjutan program dan kebutuhan tertentu di masa mendatang (Alkhasani & Murtanto, 2024); (Diniyanto, 2021).

Laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi mengenai penggunaan anggaran dan capaian program yang telah dilaksanakan (Kadjintuni et al., 2023). Selanjutnya, waktu dan efektivitas pengawasan menggambarkan pelaksanaan fungsi pengawasan untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan yang

berlaku, sedangkan tindak lanjut hasil pengawasan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit maupun evaluasi guna memperbaiki kelemahan yang ditemukan (Mbipi et al., 2021; Alkhasani & Murtanto, 2024).

Pengukuran variabel pengelolaan keuangan dalam penelitian ini menggunakan enam indikator yang dipilih karena mampu merepresentasikan keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sumber daya keuangan, pelaporan, hingga pengawasan. Keenam indikator tersebut dinilai relevan untuk menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas keuangan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pertanggungjawaban atas tata kelola dan penerimaan keuangan publik kepada masyarakat dengan cara publikasi laporan keuangan yang transparan, andal serta selaras dengan regulasi baku. Akuntabilitas tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan Pembangunan (Hasyim et al., 2024)

Dalam penelitian ini, akuntabilitas keuangan pemerintah daerah diukur melalui enam indikator, yaitu ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, kelengkapan laporan keuangan, ketepatan waktu pelaporan, serta efisiensi dan efektivitas pertanggungjawaban. Ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (Hardiningsih et al., 2019). Pencegahan penyalahgunaan wewenang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan menghindari penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (MAWUNTU, 2016). Sementara itu, pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel (Hasibuan & Syafina, 2022).

Kelengkapan laporan keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyajikan seluruh informasi keuangan secara utuh dan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja (Purba et al., 2021). Ketepatan waktu pelaporan menunjukkan bahwa laporan keuangan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sehingga informasi yang dihasilkan tetap relevan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (Noviani & Hendarsyah, 2020). Selanjutnya, efisiensi dan efektivitas pertanggungjawaban mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip value for money (Hasugian et al., 2021).

Pengukuran variabel akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan enam indikator yang dipilih karena mampu menggambarkan aspek kepatuhan terhadap peraturan, integritas dalam pengelolaan keuangan, kualitas pelaporan, serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya publik. Keenam indikator tersebut dianggap dapat merepresentasikan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh, baik dari sisi kepatuhan administratif maupun dari sisi pencapaian tujuan pengelolaan keuangan daerah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi dalam konteks pemerintahan daerah merujuk pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh publik mengenai pengelolaan keuangan daerah (Ning et al., 2025). Secara teoritis, transparansi diharapkan memiliki hubungan positif dengan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah secara transparan mengungkapkan informasi keuangan, hal ini akan meningkatkan pengawasan publik. Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memantau bagaimana dana publik dikumpulkan, dibelanjakan, dan dipertanggungjawabkan. Peningkatan pengawasan ini akan mendorong pemerintah untuk bertindak lebih hati-hati, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga meningkatkan akuntabilitas mereka. Teori ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mozin et al., 2025) menemukan bahwa

transparansi adalah pilar penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

H1: Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan Keuangan daerah melibatkan serangkaian kegiatan terstruktur yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sumber daya finansial daerah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Faisal, 2025) Hubungan antara pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah sangat erat. Pengelolaan keuangan yang efektif, yang ditandai dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan anggaran yang disiplin, serta sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang kuat, secara langsung mendukung terwujudnya akuntabilitas.

Ketika proses pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik, Risiko penyimpangan dan inefisiensi dapat diminimalisir, dan penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengindikasikan adanya hubungan positif antara pengelolaan keuangan dan akuntabilitas, penelitian yang dilakukan oleh (Firman, 2021) menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

H2: Pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif verifikatif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik pengambilan sampel secara *purposive*. Pendekatan *Purposive Sampling* adalah dipilih berdasarkan kriteria atau karakteristik spesifik yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2020).

Penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling* dengan menetapkan kriteria dan pertimbangan khusus. Tujuannya adalah untuk memastikan sampel terpilih relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian, serta mampu memberikan

representasi yang memadai. Secara spesifik, kriteria sampel yang ditentukan meliputi aparatur pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan total 113 responden.

Structural Equation Modeling (SEM) digunakan sebagai alat analisis utama dalam penelitian ini. Menurut (Ghozali, 2016), SEM adalah metode statistik canggih yang mengintegrasikan analisis faktor, yang berasal dari bidang psikometrika dan ilmu perilaku, dengan pendekatan model persamaan serentak yang berkembang dalam ekonometrik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguji dan menjelaskan hubungan kompleks antarvariabel yang diteliti, seperti pengaruh transparansi dan pengelolaan keuangan terhadap keuangan pemerintah daerah.

3. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 113 orang yang merupakan aparatur pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai profil responden, dilakukan analisis deskriptif berdasarkan beberapa karakteristik, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, serta lama bekerja.

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	62	54,9
	Perempuan	51	45,1
Usia	< 30 tahun	18	15,9
	31–40 tahun	46	40,7
	41–50 tahun	33	29,2
	> 50 tahun	16	14,2
Pendidikan	D3	14	12,4
	S1	89	78,8
	S2	10	8,8
Lama Bekerja	< 5 tahun	21	18,6
	5–10 tahun	44	38,9
	> 10 tahun	48	42,5

Sumber: Hasil Penelitian (2026).

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki dengan tingkat pendidikan S1 serta berada pada rentang usia produktif, yaitu 31–40 tahun. Selain itu, sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 tahun, yang menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman dan

pengalaman yang cukup dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa data yang diperoleh berasal dari responden yang relevan dan kompeten dalam memberikan jawaban terhadap instrumen penelitian.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan uji validitas instrumen, meliputi 6 butir pertanyaan pada variabel transparansi dan pengelolaan keuangan mencatatkan angka *loading factor* > 0,5, yang merupakan ambang batas keberterimaan item kuesioner dalam penelitian. Dengan demikian, setiap item dalam variabel ini dinyatakan sah serta reliabel untuk mengestimasi konstruk yang diamati.

Berdasarkan uji validitas instrumen, meliputi 6 butir pertanyaan pada variabel akuntabilitas keuangan pemerintah daerah mencatatkan angka *loading factor* > 0.3, yang merupakan ambang batas keberterimaan item kuesioner dalam penelitian. Dengan demikian, item kuesioner variabel akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dinyatakan sah serta reliabel untuk mengestimasi konstruk yang diamati.

Uji reliabilitas diterapkan untuk mengevaluasi konsistensi internal instrumen dalam mengukur indikator setiap variabel. Fokus utama pengujian ini adalah memastikan stabilitas jawaban responden terhadap butir-butir pertanyaan yang diajukan. Penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*, untuk menentukan tingkat realibilitas, dimana perolehan data untuk tiap variabel sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel Penelitian	<i>Alpha Cronbach's</i>	Alpha Toleransi	Status Item
1	Transparansi (X ₁)	0.906	0.7	<i>Reliabel</i>
2	Pengelolaan Keuangan X ₂	0.915	0.7	<i>Reliabel</i>
2	Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0.942	0.6	<i>Reliabel</i>

Sumber: Hasil Penelitian (2026).

Hasil yang tersaji pada Tabel 2 mengonfirmasi bahwa instrumen penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas yang dipersyaratkan. Hal ini berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh (Ghozali, 2016), sebuah instrumen dianggap *reliabel* apabila memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* yang melampaui ambang batas 0,6 ($\alpha \geq 0,6$).

Dengan demikian, kuesioner tersebut dinyatakan handal dan konsisten untuk mengukur variabel dalam penelitian ini.

Structural Equation Modeling (SEM) Analisis

Penelitian ini mengaplikasikan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk melihat bagaimana transparansi serta pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Prosedur analisis dalam SEM mencakup beberapa tahapan krusial, mulai dari uji prasyarat, evaluasi model pengukuran (*measurement model*), hingga pengujian model struktural (*structural model*). Selain itu, aspek normalitas data diperiksa untuk memastikan distribusi variabel penelitian, di mana penilaian yang didasarkan pada observasi nilai *Critical Ratio* (C.R) pada *skewness*. Kriteria normalitas data dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan (Ghozali, 2016), di mana data dianggap berdistribusi normal apabila nilai absolut *critical ratio* (C.R) pada *skewness* berada di bawah 2,58. Namun demikian, (Hariyono, 2016) memberikan kelonggaran bahwa nilai C.R pada *skewness multivariate* yang tidak melebihi angka 8 masih dapat dikategorikan layak untuk dianalisis. Dalam studi ini, evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa tiap parameter penelitian mencatatkan angka C.R *kurtosis* dalam rentang *z-score* $< 2,58$, dengan ringkasan temuan uji normalitas tiap-tiap variabel sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil *Bootstrap*

Variabel	Nilai Batas Normality	P
Transparansi X1	2,58	0,826
Pengelolaan Keuangan X2	2,58	0,422
Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Y	2,58	0,138

Sumber: Hasil Penelitian (2026).

Berdasarkan Tabel 3 hasil *Bootstrap*, data pada variabel Transparansi terkonfirmasi berdistribusi normal melalui pendekatan *Bollen-Stine bootstrap*. Hal ini didukung oleh perolehan nilai C.R *skewness univariat* yang berada pada rentang $0,826 < z < 2,58$, serta nilai C.R *multivariate* dalam kisaran $0,422 < z < 2,58$. Temuan ini menegaskan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi asumsi normalitas, baik secara *univariat* maupun *multivariate*. Pengujian dengan pendekatan *Bollen-Stine bootstrap* mengonfirmasi bahwa data penelitian telah terdistribusi normal secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan nilai C.R *skewness univariat* untuk seluruh variabel yang berada dalam rentang $0,138 < z < 2,58$. Dengan terpenuhinya kriteria tersebut, dapat

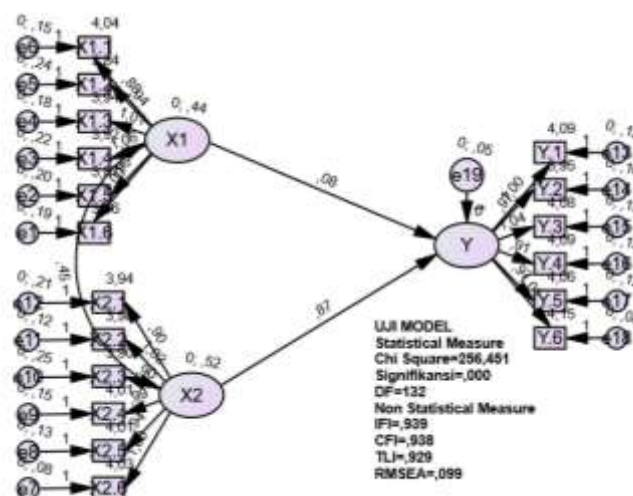
disimpulkan bahwa data dari penelitian ini terdistribusi secara normal dan layak untuk dianalisis pada tahap berikutnya.

Uji Normalitas

Evaluasi normalitas pada data variabel Transparansi menunjukkan bahwa meskipun nilai C.R *skewness univariat* tercatat sebesar 18,849 dan nilai *multivariate* mencapai 35,542. Hal ini dikarenakan penelitian ini menerapkan prosedur *Bollen-Stine bootstrap* untuk mengatasi distribusi data yang melampaui ambang batas standar ($z > 2,58$ dan $z > 8,00$), dan data pada variabel pengelolaan keuangan dibuktikan dengan posisi angka C.R *skewness univariat* pada rentang $30,134 < 2,58$, konsistensi serupa juga terlihat pada capaian C.R *multivariate* pada rentang $56,822 < 2,58$. Serta data pada variabel akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dengan posisi angka C.R *skewness univariat* pada rentang $27,776 < 2,58$, konsistensi serupa juga terlihat pada capaian C.R *multivariate* pada rentang $52,375 < 2,58$. Dengan pendekatan tersebut, model tetap dianggap stabil dan memenuhi kriteria untuk pengujian *univariat* maupun *multivariate*.

Pengujian Model Pengukuran Dengan SEM

Berdasarkan Gambar 1, data penelitian tersebut dikumpulkan dari aparatur pemerintah daerah yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses pengumpulan data primer dilakukan dengan memanfaatkan instrumen kuesioner, melalui teknik *purposive sampling* dengan melibatkan sebanyak 113 responden. Dengan demikian, ukuran sampel ini dianggap *representatif* dan memadai untuk menghasilkan estimasi model yang akurat.



Sumber: Hasil Penelitian (2026).

Gambar 1. Hasil Pengaruh Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Sebelum Modifikasi.

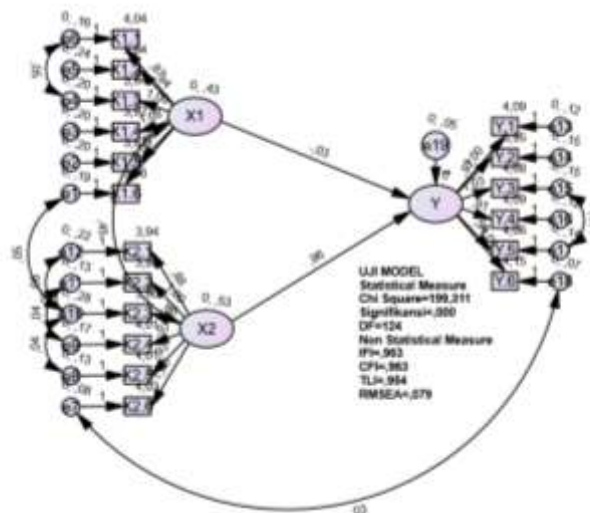
Evaluasi terhadap kelayakan model dilakukan dengan mengacu pada berbagai parameter *Goodness of Fit*, termasuk indeks GFI. Hasil evaluasi mengenai kriteria penilaian serta perolehan nilai kritis yang menunjukkan validitas model tersebut dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 4. Evaluasi GFI Model (Uji Tahap Awal)

Kriteria	Cut-Off Value	Hasil Model	Evaluasi Model
<i>Chi-square</i>	Diharapkan kecil	256,451	Baik
<i>Probability</i>	$\geq 0,05$	$\geq 0,000$	Baik
CMIN/DF	$\leq 3,00$	1,943	Baik
CFI	$\geq 0,90$	0,938	Baik
IFI	$\geq 0,90$	0,939	Baik
TLI	$\geq 0,95$	0,929	Kurang Baik
RMSEA	$\leq 0,08$	0,099	Kurang Baik

Sumber: Hasil Penelitian (2026).

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tabel 4, menunjukkan bahwa model awal belum mencapai tingkat kesesuaian yang dipersyaratkan, khususnya pada parameter TLI dan RMSEA yang masih berada di luar ambang batas kriteria. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada Gambar 2 dilakukan langkah optimasi melalui *modification indices* untuk meningkatkan kecocokan model agar layak digunakan dalam pengujian hipotesis. Proses modifikasi ini dilakukan dengan menyesuaikan antar-indikator atau *error terms* hingga diperoleh model struktural yang sesuai dengan standar validitas.



Sumber: Hasil Penelitian (2026).

Gambar 2. Hasil Pengaruh Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Sesudah Modifikasi.

Penelitian ini dilakukan modifikasi struktural dengan menghubungkan hubungan antar variabel utama serta penyesuaian pada *error terms* (e_1 hingga e_{19}), diperoleh hasil akhir pengujian *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) untuk model secara keseluruhan setelah melalui proses modifikasi tersebut, ditampilkan di bawah ini:

Tabel 5. Evaluasi GFI Model (Uji Tahap Akhir)

Kriteria	<i>Cut-Off Value</i>	Hasil Model	Evaluasi Model
<i>Chi-square</i>	Diharapkan kecil	199,311	Baik
<i>Probability</i>	$\geq 0,05$	$\geq 0,000$	Baik
CMIN/DF	$\leq 3,00$	1,607	Baik
CFI	$\geq 0,90$	0,963	Baik
IFI	$\geq 0,90$	0,963	Baik
TLI	$> 0,95$	0,954	Baik
RMSEA	$\leq 0,08$	0,079	Baik

Sumber: Hasil Penelitian (2026).

Berdasarkan data pada Tabel 5, variabel persepsi kemudahan memiliki karakteristik distribusi yang dapat diterima dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Meskipun nilai *Critical Ratio* (C.R) *skewness* dan *kurtosis univariat* tercatat pada angka $199,311 < z < 2,58$. Namun, hasil pengujian secara C.R *multivariate* menghasilkan nilai 0,000 yang memenuhi standar interval $z < 8,00$. Temuan ini membuktikan bahwa secara bersama-sama, data dari variabel persepsi kemudahan telah memenuhi syarat normalitas yang dipersyaratkan dalam model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Tahapan berikutnya adalah melakukan pengujian hipotesis penelitian guna mengevaluasi hubungan antar variabel yang telah diajukan. Analisis ini dilakukan dengan mengamati nilai *t-value* pada tingkat signifikansi 0,05. Dalam output AMOS 24, parameter ini direpresentasikan dengan meninjau angka *Critical Ratio* (C.R) yang tertera pada kolom *Regression Weights*. Hipotesis penelitian (H1) dikonfirmasi kebenarannya apabila nilai C.R melampaui ambang batas 1,985 atau nilai probabilitas (P) lebih kecil dari 0,05. Hasil pengolahan data menggunakan AMOS 24 disajikan dalam Tabel 6 berikut:

Tabel 6. *Regression Weights*: (Group number 1 - Default model)

Variabel	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y <--- X1	0,344	0,613	0,561	0,575	par 16
Y <--- X2	0,129	0,740	0,175	0,861	par 17

Sumber: Hasil Penelitian (2026).

Persepsi Akhir Variabel Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Tidak Berkontribusi Positif dan Tidak Signifikan

Hasil pengujian terhadap proposisi penelitian, terutama yang berkaitan dengan variabel transparansi ditunjukkan dalam data pada Tabel 6. Tercatat bahwa angka *Critical Ratio* (C.R) hanya mencapai 0,561 yang berada di bawah nilai *cut-off* sebesar 1,985, serta nilai probabilitas sebesar 0,575 juga melampaui batas toleransi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek transparansi tidak memberikan kontribusi positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Hasil pengujian terhadap proposisi penelitian, terutama yang berkaitan dengan variabel pengelolaan keuangan ditunjukkan dalam data pada 1Tabel 6. Tercatat bahwa angka *Critical Ratio* (C.R) hanya mencapai 0,175 yang berada di bawah nilai *cut-off* sebesar 1,985, serta nilai probabilitas sebesar 0,861 juga melampaui batas toleransi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek transparansi tidak memberikan kontribusi positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengujian mengindikasikan bahwa transparansi dan pengelolaan keuangan tidak berdampak positif atau signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mampu meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Transparansi pada dasarnya adalah prinsip yang menekankan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah menjadi mudah diakses dan mudah dipahami. Meskipun demikian, pengelolaan keuangan daerah mencakup rangkaian kegiatan seperti pertanggungjawaban, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien dan selaras dengan peraturan yang berlaku. Menurut (Mozin et al., 2025) transparansi dan pengelolaan keuangan yang telah diterapkan belum tentu secara langsung meningkatkan akuntabilitas apabila tidak didukung oleh sistem pengawasan yang baik, kompetensi aparatur pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan masukan dari narasumber yang relevan dalam tata kelola keuangan daerah, diperoleh informasi bahwa dalam praktik pengelolaan keuangan di pemerintah daerah, implementasi transparansi masih cenderung bersifat formalitas administratif.

Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pemahaman aparaturnya terhadap prinsip keterbukaan informasi, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah secara menyeluruh. Selain itu, narasumber juga menekankan bahwa pengelolaan keuangan sering kali lebih berfokus pada pemenuhan prosedur pelaporan dibandingkan dengan substansi akuntabilitas yang seharusnya tercapai. Kondisi ini memperkuat temuan kuantitatif bahwa transparansi dan pengelolaan keuangan belum sepenuhnya mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa, transparansi dan pengelolaan keuangan belum memberikan dampak krusial bagi penguatan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo, meskipun secara konseptual keduanya memiliki hubungan yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh hasil analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) yang memperlihatkan nilai *Critical Ratio* (C.R.) dan probabilitas yang tidak memenuhi kriteria signifikansi, menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan tidak dapat diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan transparansi dan pengelolaan keuangan yang ada saat ini belum berjalan secara optimal dalam mendorong peningkatan akuntabilitas, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor lain misalnya kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, maupun pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh terhadap implementasi transparansi dan pengelolaan keuangan agar lebih efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mengukuhkan praktik tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel.

Referensi

- Adi Yuniarta, G., & Gusti Ayu Purnamawati, I. (2020). Key elements of local government transparency in new public governance. *Problems and Perspectives in Management*, 18(4), 96–106. [https://doi.org/10.21511/ppm.18\(4\).2020.09](https://doi.org/10.21511/ppm.18(4).2020.09)
- Ahmad, Z. H., Alfayn, M. A. N., & Istiqoh, A. E. (2022). Analisis Upaya Strategis dalam Memaksimalkan Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1432. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2143>

- Alkhasani, M. R., & Murtanto. (2024). Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(11), 6–28. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>
- Anggraini, K. D., & Afiqoh, N. W. (2024). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Kabupaten Gresik. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 3162–3174. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i2.8876>
- Astuti, H. P., & Madjid, U. (2024). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang. *JKP) Journal of Government, Social and Politics*, 10, 174–185. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).17119](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17119)
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2021). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *JURNAL FAIRNESS*, 3(1), 21–42. <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15274>
- Diniyanto, A. (2021). Peraturan Daerah Dana Cadangan: Strategi Alternatif Pembangunan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Faisal, H. (2025). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Bappenas Working Papers*, 8(3), 460–484. <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.411>
- Firman, M. (2021). *Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Gowa*.
- Ghozali, I. (2016). *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS 24*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P., O., R. M., Srimindarti, C., & Kristiana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i1.4963>
- Hasibuan, & Syafina. (2022). Urgensi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Pencegahan Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(4), 1233–1241. <https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.13408>
- Hasugian, F. T., Syahputra, R. A., & Harahap, A. R. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah

- Kabupaten Labuhanbatu Pusat). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 6(2), 175–185. <https://doi.org/10.51544/jma.v6i2.1997>
- Hasyim, W., Pattawe, A., Din, M., Furqan, A. C., & Megawati, M. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 5(3), 587–601. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.10394>
- Kadjintuni, Z., Tontik, D., Darman, D., Rachman, A., & Dunggio, T. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Boalemo. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4124>
- MAWUNTU, J. R. (2016). Penyalahgunaan Wewenang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Kinerja Dan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Litigasi*, 14(2). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v14i2.87>
- Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(2), 152–158. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503>
- Mozin, S. Y., Abdussamad, S. N., & Saputra, I. (2025). Peran Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Tinjauan Systematic Literature Review. In *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)* (Vol. 3). <https://doi.org/https://doi.org/10.70248/jogapa.v3i1.3316>
- Ning, A., Sulistiowati, T., Tri Anisa, S., Meilinda, A., Misidawati, D. N., Islam, U., Wahid, N. K. H. A., & Korespondensi, P. (2025). Transparansi Keuangan Daerah (Sulistiowati,dkk) | 12-18. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 3(3), 12–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15308018>
- Noviani, A., & Hendarsyah, D. (2020). Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(2), 206–213. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i2.2477>
- Nuryani, & Firmansyah, A. (2020). Determinants of Transparency in Financial Management on Local Government Websites: Evidence from Indonesia. *Humanities and Social Sciences Letters*, 8(2), 145–155. <https://doi.org/10.18488/journal.73.2020.82.145.155>
- Octavio, M. F. R., & Urumsah, D. (2024). Exploring Factors Influencing Digital Transparency in Local Governments: Practices in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 11(2), 279–296. <https://doi.org/10.24815/jdab.v11i2.39361>
- Purba, M., Agusti, R., & Rofika, R. (2021). Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Pada Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Daerah. *Current: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(3), 418–434. <https://doi.org/10.31258/jc.2.3.418-43>

Rafael, K., Gamaliel, H., & Korompis, C. W. M. (2024). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 19(1), 52–63.

Rahimallah, M. T. A., & Ricky, R. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.291>